



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB WARGA BINAAN USIA DEWASA MENJADI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Frisna Wati Hutagalung

Dinas Sosial Provinsi Riau, Riau, Indonesia

Email: frisnawatihutagalung@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Berfluktuasinya jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan, (2) Belum pahamnya masyarakat pedesaan usia dewasa akan situasi kehidupan dan daya saing yang sebenarnya diperkotaan, (3) Belum meratanya lapangan pekerjaan yang tersedia serta belum sesuainya lapangan pekerjaan yang ada dengan kemampuan masyarakat, (4) Tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang belum terkontrol dengan baik, (5) Faktor-faktor penyebab gelandangan dan pengemis pada usia dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui berbagai faktor-faktor penyebab warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis di UPT. Pelayanan Gelandangan dan Pengemis Binjai dari Aspek Internal dan Eksternal. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah warga binaan usia dewasa di UPT. Pelayanan Gelandangan dan Pengemis Binjai sebanyak 78 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dengan menggunakan rumus $P = F/N \times 100\%$. Hasil penelitian menunjukkan uraian faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis secara rangking dari faktor internal yaitu sikap 1) Mental, 2) Sifat Malas, 3) Cacat Fisik. Sedangkan dari faktor eksternal adalah 1) Kemiskinan, 2) Ekonomi, 3) Pendidikan, 4) Labil/Ikut-Ikutan, 5) Keterampilan Kerja, 6) Letak Geografis, 7) Sudah Tidak Berdaya.

Kata Kunci: gelandangan, pengemis, warga binaan, usia dewasa

Abstract: This research aims to determine (1) the fluctuating number of homeless people and beggars on the streets, (2) the lack of understanding among adult rural communities about the real life situation and competitiveness in urban areas, (3) the unequal distribution of available employment opportunities and the inadequacy of available employment opportunities. there are the capabilities of the community, (4) The level of population movement from villages to cities that has not been well controlled, (5) Factors causing homelessness and begging in adulthood. This research aims to: determine the various factors that cause adult inmates to become homeless and beggars at UPT. Binjai Homeless and Beggar Services from Internal and External Aspects. The type of research used is descriptive quantitative. The sample in this study were adult inmates at UPT. Services for Homeless and Beggars in Binjai as many as 78 people. The data collection method was carried out by distributing questionnaires and documentation studies. Data analysis was carried out in a descriptive manner using the formula $P = F/N \times 100\%$. The results of the research showed a description of the factors causing homelessness and beggars ranked from internal factors, namely 1) Mental attitude, 2) Lazy nature, 3) Physical disability. Meanwhile, the external factors are 1) Poverty, 2) Economy, 3) Education, 4) Unstable/Getting Along, 5) Work Skills, 6) Geographical Location, 7) No longer Powerless..

Keywords: vagrants, beggars, fostered citizens, adults

History Article: Submitted 11 June 2024 | Revised 10 October 2024 | Accepted 8 December 2024

How to Cite: Hutagalung, F. W., & Hutagalung, F. W. (2024). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB WARGA BINAAN USIA DEWASA MENJADI GELANDANGAN DAN PENGEMIS. *Journal Education for All : Media Informasi Ilmiah Bidang Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1), 41-51. DOI: <https://doi.org/10.24114/jefa.v13i1.59517>



PENDAHULUAN

Fenomena gelandangan dan pengemis di kawasan perkotaan menjadi salah satu persoalan sosial yang kompleks dan mendesak untuk ditangani. Kehadiran mereka tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan struktural yang ada di masyarakat. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian khusus adalah warga binaan usia dewasa yang menjadi gelandangan dan pengemis. Pada usia ini, seseorang seharusnya memiliki kemandirian serta kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Delfirman et al., n.d.; Taiwo, 2018). Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi marginal akibat berbagai faktor yang saling terkait.

Berfluktuasinya jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat desa usia dewasa dalam menghadapi kerasnya persaingan hidup di kota besar (Aizuddin et al., 2019; Aji et al., 2023). Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan masyarakat turut memperparah keadaan (Waleleng et al., n.d.). Migrasi penduduk dari desa ke kota yang tidak terkendali juga menjadi faktor yang mempercepat terjadinya masalah ini. Di sisi lain, faktor internal seperti rendahnya motivasi diri, sikap mental yang lemah, hingga keterbatasan fisik sering kali memperburuk peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab utama yang mendorong warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis, dengan fokus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Gelandangan dan Pengemis Binjai. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek internal dan eksternal yang memengaruhi kondisi tersebut. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan dan program pembinaan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis, serta mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Fenomena gelandangan dan pengemis merupakan konsekuensi logis dari problem sosial yang muncul akibat migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, terutama kelompok dengan karakteristik sosial ekonomi rendah (Indriyani et al., n.d.; Kencana et al., n.d.; Korstanje, 2024). Ketidakberdayaan ekonomi kelompok ini melahirkan fenomena sosial yang kompleks, yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun akademisi. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, fenomena ini memunculkan berbagai komunitas marginal, seperti pemukiman kumuh, perkampungan melarat, dan kelompok gelandangan serta pengemis (Bedasari et al., n.d.; Husein Suti, 2022).

Di Sumatera Utara, urbanisasi menjadi salah satu penyebab utama. Penduduk pedesaan lebih memilih pindah ke kota dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan di desa. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, bersama kota-kota lainnya seperti Pematang Siantar, Deli Serdang, dan Binjai, menjadi tujuan utama urbanisasi seiring pertumbuhan ekonomi regional (Agyemang et al., 2024; Murphy, 2016). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesempatan kerja di daerah tujuan urbanisasi belum mampu menampung seluruh pendatang akibat keterbatasan lapangan kerja (Waleleng et al., n.d.).

Masalah ini semakin rumit karena sebagian besar masyarakat desa yang bermigrasi ke kota tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai untuk bersaing di pasar tenaga kerja perkotaan. Ketidakmampuan ini membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, sehingga banyak dari mereka, termasuk orang tua dan anak-anak, rela melakukan apa saja demi bertahan hidup. Menurut Koentjaraningrat (1980), kebutuhan dasar manusia mencakup kebutuhan makan dan hidup, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini memunculkan gelandangan dan pengemis sebagai salah satu manifestasi masalah sosial (Korstanje, 2024; Rehman et al., 2023).

Selain itu, kualitas sumber daya manusia di pedesaan yang rendah dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan produktivitas kerja yang juga rendah. Arus urbanisasi yang tidak terkendali memperburuk situasi dengan menciptakan masalah sosial baru di masyarakat, termasuk gelandangan dan pengemis. Jumlah pengemis berfluktuasi setiap

tahun, dipengaruhi oleh dinamika modernisasi, urbanisasi, globalisasi, dan pasar bebas yang menekan perekonomian masyarakat, serta peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja (Aji et al., 2023; Owusu & Kankam, 2020).

Kehidupan gelandangan dan pengemis di jalanan sering kali diwarnai oleh kondisi kesehatan yang buruk dan minimnya kebersihan. Banyak dari mereka mengalami penyakit kulit akibat pakaian yang tidak layak, kurangnya akses terhadap air bersih, dan gizi buruk, terutama pada anak-anak (Indriyani et al., n.d.; Maryatun et al., n.d.). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem sosial, tetapi juga menuntut intervensi yang komprehensif untuk mengatasi dampaknya secara berkelanjutan.

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia di setiap tahunnya selalu berjumlah banyak/ribuan orang terlihat dari Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Departemen Sosial RI Tahun 2004 populasi gelandangan dan pengemis seluruh Indonesia berjumlah 87.365, Tahun 2006 berjumlah 68.648 orang dan tahun 2007 berjumlah 61.090 orang, sedangkan di tahun 2010 tercatat 201.140 orang. (DepSos RI 2011:1).Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta mengembara di tempat umum, hingga hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup mengembara dan sekaligus mengemis oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. (Kementrian Sosial RI 2010 ; 3-4).

Sedangkan di Sumatera Utara sesuai data tahun 2006 jumlah gelandangan dan pengemis 7.813 orang dengan rincian gelandangan sebanyak 4.373 orang, sementara pengemis sebanyak 3.440 orang. Sedangkan pada tahun 2007 yang diperoleh dari Dinas Sosial Sumatera Utara menunjukkan jumlah gelandangan dan pengemis 8.123 orang. Rinciannya, 3.300 pengemis, 4.823 gelandangan. Mengalami peningkatan sekitar 3,98% dari tahun 2006 berjumlah 7.813 orang hingga 2007 berjumlah 8.123 orang. Sedangkan pada tahun 2013 gelandangan dan pengemis Sekabupaten Kota Sesumatera Utara mencapai 4.158 orang dengan rincian 2.454 orang gelandangan dan 1.704 pengemis. (Sumber: Dinas Sosial Medan).

Terlihat juga dari jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di UPT. Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai tempat peneliti melakukan penelitian data dari unit ini menunjukkan jumlah warga binaan keseluruhan berjumlah 215 orang pada tahun 2014 dengan rincian usia dewasa bulan Januari 103 orang, pada bulan Februari 95 orang, dan bulan Maret 93 dan April 104 orang. Jumlah warga binaan di UPT. Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai terdiri dari para gelandangan dan pengemis yang dirazia Satpol Pamong Praja dan orang-orang yang rentan terhadap masalah kemiskinan, yang datang dengan kemauan sendiri, diserahkan oleh keluarga, mengungsi karena adanya bencana alam. Jumlah gelandangan dan pengemis di UPT. Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai ini keseluruhan 215 orang karena memang daya tampung di sana adalah 215 orang warga binaan dengan system terminasi selama 2 tahun masa binaan.

Dalam penelitian ini diangkat judul yang terfokus pada usia dewasa karena masa dewasa adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan, masa ini dibagi dalam 3 periode yaitu: masa dewasa awal dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. Masa dewasa pertengahan, dari umur 40 tahun sampai umur 60 tahun, dan masa akhir atau usia lanjut, dari umur 60 tahun sampai mati. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemandirian dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Pada masa dewasa ini pulalah banyak masalah yang dihadapi oleh seseorang antara lain masalah pemenuhan kebutuhan dan masalah-masalah sosial lainnya yang menuntutnya untuk terus bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Masa

dewasa erat hubungannya dengan meningkatnya kebutuhan manusia kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan biologis yaitu kebutuhan makan dan hidup selain untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri orang dewasa akan memikirkan untuk menikah dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Kebutuhan orang dewasa juga merupakan perpaduan yang bersumber dari dirinya sendiri dan tuntutan dari lingkungannya. Diantara kebutuhan utama yang kuat mendorong individu orang dewasa untuk berkeluarga adalah kebutuhan material.

Menurut Eric (2024) gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup mengelandangan dan sekaligus mengemis (Agyemang et al., 2024). Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, teras-teras toko, jempatan layang (*fly over*), pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk tetap bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya gelandangan dan pengemis yang kebanyakan menghabiskan waktunya di jalanan ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengemis, mengamen, menjadi pencari/ pengutip sampah plastik, mencari nasi sisa pada tempat-tempat sampah (untuk dijadikan nasi aking dan dimasak kembali untuk dimakan), menjual dagangan songan, jasa semir sepatu, menjual Koran, tukang sapu angkot, tukang parkir. Ada juga dari mereka yang berpura-pura sakit (cacat) secara fisik nya dan meminta-minta di jalan-jalan dan di lampu-lampu merah. Hal ini dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis menghitung sangat sulitnya untuk mencari pekerjaan di kota serta kurang meratanya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat dan tidak sesuainya latar belakang pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang ada (Aizuddin et al., 2019; Waleleng et al., n.d.).

Menjadi gelandangan dan pengemis bukan sekadar pilihan hidup, tetapi sering kali merupakan bentuk adaptasi yang terpaksa dilakukan oleh sebagian masyarakat perkotaan. Kondisi ini mencakup mereka yang bermigrasi dari desa ke kota melalui urbanisasi maupun penduduk asli kota itu sendiri, yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena ini berdampak signifikan pada kehidupan perkotaan, salah satunya dengan menciptakan ketidakaturan sosial (*social disorder*). Ketidakaturan ini terlihat dari kesemrawutan, ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta menurunnya estetika lingkungan kota.

Ironisnya, para gelandangan dan pengemis ini adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, 2, dan 3, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1). Negara juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Selain itu, negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyatnya (ayat 3). Hal ini menegaskan bahwa persoalan gelandangan dan pengemis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab negara untuk memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, pertumbuhan populasi di perkotaan sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Banyaknya jumlah penduduk di kota menjadi indikator langsung yang dapat digunakan untuk memperkirakan skala permasalahan gelandangan dan pengemis di suatu wilayah. Fenomena ini menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah sosial tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, kesehatan, dan tata kelola perkotaan.

Kajian mendalam terhadap fenomena gelandangan dan pengemis menjadi penting untuk memahami akar permasalahan serta merumuskan solusi yang komprehensif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengintegrasikan kelompok ini kembali ke masyarakat sekaligus menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, isu ini tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat, keadaan, dan gejala yang terkait dengan fenomena warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Balai Pungai Sejahtera Binjai. Penelitian ini juga berupaya menentukan frekuensi serta hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kondisi tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi dua aspek utama, yaitu faktor internal yang mencakup sikap mental, motivasi, kondisi fisik, dan kebiasaan individu, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan geografis tempat tinggal responden.

Untuk pengumpulan data, digunakan dua teknik utama: angket (kuesioner) dan studi dokumentasi. Angket bersifat tertutup dengan pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi secara spesifik terkait faktor-faktor penyebab yang telah diidentifikasi. Angket ini didistribusikan kepada 78 responden, yaitu warga binaan usia dewasa yang berada di UPT Binjai. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data primer dengan dokumen pendukung, seperti profil demografi responden dan catatan terkait yang tersedia di UPT.

Data yang terkumpul melalui angket diolah menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung frekuensi dan persentase setiap jawaban responden. Langkah pertama adalah mengkategorikan data sesuai dengan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, dilakukan tabulasi frekuensi menggunakan rumus: $P = \frac{NF}{NN} \times 100\%$ di mana PP adalah persentase, FF adalah jumlah frekuensi pada kategori tertentu, dan NN adalah jumlah total responden. Hasil tabulasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang lebih menarik dan mudah dipahami. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan pola atau hubungan antar faktor yang ditemukan.

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Informasi yang Dikumpulkan

| Teknik Pengumpulan Data | Jenis Informasi yang Dikumpulkan |
|-------------------------|--|
| Angket (Kuesioner) | Data internal (mental, motivasi, fisik, kebiasaan); Data eksternal (ekonomi, pendidikan, lingkungan). |
| Studi Dokumentasi | Profil demografi, catatan terkait responden, data pendukung dari UPT Binjai. |

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis. Hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program pembinaan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Mental Warga Binaan sebagai Penyebab Menjadi Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pungai Sejahtera Binjai, penelitian ini mencakup 78 responden dengan proporsi laki-laki sebanyak 45 orang (57,69%) dan perempuan sebanyak 33 orang (42,30%). Analisis mendalam dilakukan untuk memahami faktor-faktor internal yang memengaruhi warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis, salah satunya adalah kondisi mental.

Mental adalah aspek penting yang mencerminkan kepribadian seseorang, termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Ketahanan mental menjadi salah satu indikator utama dalam menghadapi tekanan hidup. Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan tiga kategori responden berdasarkan tingkat rasa malu yang dirasakan terkait status mereka sebagai gelandangan dan pengemis:

Tabel 2. Kondisi Mental Warga Binaan

| Kategori Mental Responden | Frekuensi (Orang) | Persentase (%) |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| Sangat Merasa Malu | 18 | 23,07 |
| Merasa Malu | 26 | 33,33 |
| Tidak Merasa Malu | 34 | 43,58 |

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (43,58%) tidak merasa malu terhadap status mereka. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi lemahnya norma sosial yang memengaruhi perilaku mereka atau adaptasi terhadap keadaan yang dianggap normal oleh lingkungan mereka. Sementara itu, sebanyak 33,33% responden merasa malu dan 23,07% merasa sangat malu. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman respons mental terhadap situasi yang dihadapi.

Tidak Merasa Malu (43,58%), artinya responden dalam kategori ini menunjukkan adaptasi terhadap status sebagai gelandangan dan pengemis. Mereka cenderung tidak terpengaruh secara emosional oleh stigma sosial yang melekat. Kondisi ini mungkin terjadi akibat proses normalisasi yang berulang di lingkungan mereka, di mana kehidupan di jalanan menjadi sesuatu yang diterima. Kemudian, Merasa Malu (33,33%), artinya responden yang merasa malu menunjukkan kesadaran akan stigma negatif dari masyarakat. Namun, meskipun ada rasa malu, keterbatasan akses terhadap pekerjaan atau sumber daya lain mendorong mereka untuk tetap menjalani kehidupan tersebut demi memenuhi kebutuhan dasar. Lalu, Sangat Merasa Malu (23,07%) bermakna responden yang sangat merasa malu mengindikasikan ketidaknyamanan mendalam dengan status mereka. Kelompok ini kemungkinan besar mengalami tekanan psikologis yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Namun, faktor eksternal seperti kemiskinan dan keterbatasan pilihan mungkin memaksa mereka untuk tetap hidup sebagai gelandangan atau pengemis.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam merancang program pembinaan untuk warga binaan. Intervensi Psikososial diperlukan karena Responden yang tidak merasa malu membutuhkan intervensi untuk meningkatkan kesadaran mereka akan norma sosial yang sehat dan memperkuat motivasi mereka untuk beralih dari kehidupan di jalanan (Aji et al., 2023). Sesi konseling dan pelatihan yang menekankan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab sosial dapat menjadi solusi. Kemudian, Pelatihan Keterampilan Hidup perlu dilakukan karena Responden yang merasa malu atau sangat merasa malu perlu didukung melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka untuk memperluas peluang kerja (Harahap & Irwan, 2019; Indriyani et al., n.d.; Irwan et al., 2022). Selanjutnya Peningkatan Ketahanan Mental, semua kelompok memerlukan program peningkatan ketahanan mental melalui pelatihan manajemen stres, pengembangan pola pikir positif, dan pemberdayaan diri, dan Pendekatan Berbasis Komunitas, karena membangun jaringan dukungan komunitas yang inklusif dapat membantu responden untuk merasakan dukungan sosial yang lebih besar, sehingga mengurangi tekanan psikologis dan stigma yang mereka hadapi.

Jadi, kondisi mental warga binaan menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mereka untuk menjadi gelandangan dan pengemis. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya intervensi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan mental dan kepribadian. Dengan pendekatan yang holistik, program pembinaan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar untuk membantu warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Cacat Fisik/Penyandang Disabilitas sebagai Faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis

Penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun mental, menghadapi hambatan signifikan dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Definisi penyandang cacat fisik dan mental mencakup individu dengan gangguan atau kelainan fisik (seperti tunanetra, tunarungu, atau tunadaksa), gangguan mental (seperti retardasi mental atau eks psikotik), serta kombinasi

dari keduanya. Disabilitas ini menciptakan tantangan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali rentan menjadi gelandangan atau pengemis karena berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal.

Penelitian menunjukkan bahwa penyandang cacat fisik sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai karena keterbatasan fisik mereka. Dalam survei yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) (2021), sekitar 80% penyandang disabilitas di negara berkembang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hambatan ini diperburuk oleh kurangnya akses terhadap pelatihan kerja yang inklusif dan peluang kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Gowreesunkar et al., 2021). Sebagai contoh, sebuah studi di India oleh Das et al. (2020) menunjukkan bahwa 72% penyandang disabilitas fisik di daerah perkotaan berakhir dalam pekerjaan informal, dengan pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan. Ketika pekerjaan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka sering kali terdorong untuk mencari penghidupan melalui jalanan, termasuk mengemis (Owusu & Kankam, 2020).

Kemudian, penyandang cacat mental menghadapi stigma sosial yang lebih besar dibandingkan penyandang cacat fisik. Mereka sering kali dianggap tidak produktif atau tidak mampu, yang menghambat mereka untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Menurut Yuan et al. (2019) dalam sebuah studi di China, penyandang cacat mental memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi daripada penyandang cacat fisik, dengan lebih dari 60% dari mereka yang bergantung sepenuhnya pada dukungan keluarga atau pemerintah (Rehman et al., 2023; Salifu & Abdul-Karim, 2024). Sementara, di Indonesia, laporan dari Kementerian Sosial RI (2020) menunjukkan bahwa 40% penyandang cacat mental tidak terdeteksi dalam data pemerintah, sehingga mereka tidak mendapatkan akses ke program kesejahteraan sosial. Situasi ini menyebabkan mereka sering kali berakhir di jalanan sebagai gelandangan atau pengemis, karena kurangnya dukungan keluarga atau komunitas.

Selain itu, penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fisik sekaligus mental menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Studi dari Katz et al. (2022) di Amerika Serikat menyatakan bahwa individu dengan cacat ganda memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar menjadi tunawisma dibandingkan individu tanpa disabilitas (Rehman et al., 2023; Taiwo, 2018). Hal ini disebabkan oleh kombinasi keterbatasan fisik dan kebutuhan khusus mental yang sulit dipenuhi oleh sistem pelayanan sosial yang ada. Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pungai Sejahtera Binjai, banyak penyandang disabilitas fisik dan mental yang menjadi warga binaan. Ketiadaan akses terhadap fasilitas kesehatan, alat bantu mobilitas, atau program pelatihan keterampilan menjadi penghalang utama bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

Padahal, di negara maju seperti Jerman dan Swedia, penyandang disabilitas memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan karena kebijakan inklusi yang kuat dan akses terhadap pendidikan yang disesuaikan. Menurut laporan dari OECD (2021), tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di negara-negara tersebut mencapai 50-60%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang yang rata-rata hanya 20-30%. Namun, bahkan di negara maju, penyandang disabilitas yang tidak memiliki dukungan keluarga atau komunitas masih berisiko menjadi gelandangan. Sebagai contoh, laporan dari National Alliance to End Homelessness (2020) di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 25% tunawisma adalah penyandang disabilitas yang kehilangan tempat tinggal karena biaya hidup yang tinggi dan kurangnya dukungan sosial (Husein Suti, 2022; Sari et al., n.d.).

Sifat Malas

Sifat malas merupakan kecenderungan individu untuk tidak mau bekerja atau berusaha secara produktif. Orang dengan sifat malas cenderung memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti menggelandang dan mengemis, tanpa melakukan usaha yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang toleran terhadap perilaku tersebut. Studi oleh Bradshaw et al. (2018) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa faktor kebiasaan malas memiliki kaitan erat dengan

keterbatasan akses pendidikan sejak dini. Tanpa dorongan untuk belajar dan bekerja, individu cenderung memilih opsi yang lebih mudah, seperti meminta-minta (Banks et al., 2003; Korstanje, 2024). Penelitian lain oleh Purnomo et al. (2020) di Indonesia juga mendukung temuan ini, menyebutkan bahwa banyak pengemis yang memandang kegiatan meminta-minta sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau tanggung jawab yang besar.

Kemiskinan

Kemiskinan sering kali menjadi akar masalah yang memaksa individu atau keluarga untuk menjadi gelandangan dan pengemis. Data dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi akibat ketidakmerataan distribusi sumber daya. Penelitian oleh Rohmat (2022) menemukan bahwa 65% pengemis di daerah perkotaan berasal dari keluarga miskin dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan. Studi lain di India oleh Das et al. (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan sering kali memaksa keluarga untuk terlibat dalam pekerjaan informal, termasuk meminta-minta, demi bertahan hidup (Septiadi, Dudi Nursan, 2020; Sopah et al., 2020). Hal ini diperparah dengan kurangnya akses ke program pengentasan kemiskinan yang efektif.

Ekonomi dan Pendidikan

Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya lapangan kerja menjadi salah satu faktor pendorong utama gelandangan dan pengemis. Menurut Bappenas (2021), pertumbuhan ekonomi yang melambat berdampak langsung pada terbatasnya peluang kerja di sektor formal maupun informal. Sebuah studi di Nigeria oleh Adewale et al. (2019) menunjukkan bahwa ketidakmampuan ekonomi keluarga sering kali menyebabkan mereka mencari penghasilan melalui aktivitas di jalanan, termasuk mengemis. Di Indonesia, Setiawan (2022) menemukan bahwa masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan menjadi pengemis karena keterbatasan akses mereka terhadap pekerjaan yang layak (Agyemang et al., 2024).

Sementara, pendidikan adalah faktor penting yang menentukan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung menghalangi individu untuk bersaing di pasar kerja. Penelitian oleh UNESCO (2020) menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendidikan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau terlibat dalam pekerjaan informal, termasuk menjadi gelandangan dan pengemis. Studi oleh Surya et al. (2021) di Jakarta menemukan bahwa lebih dari 70% pengemis di wilayah tersebut hanya memiliki pendidikan dasar atau bahkan tidak menyelesaikan sekolah. Rendahnya pendidikan juga memengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan keterampilan atau mencari peluang kerja yang lebih baik.

Labil/Ikut-Ikutan

Banyak individu, terutama yang masih muda, menjadi gelandangan dan pengemis karena pengaruh lingkungan atau ajakan teman. Fenomena ini sering terjadi karena kurangnya kestabilan emosional dan pengaruh sosial yang kuat. Penelitian oleh Kumar et al. (2020) di India menunjukkan bahwa sekitar 30% dari pengemis muda mulai mengemis karena mengikuti teman atau keluarga yang telah sukses secara ekonomi dari aktivitas ini. Fenomena serupa ditemukan di Indonesia oleh Rahman et al. (2021), yang menyebutkan bahwa narasi keberhasilan ekonomi dari pengemis lain menjadi daya tarik yang mendorong individu baru untuk terlibat dalam aktivitas mengemis.

Letak Geografis

Letak geografis yang strategis, seperti di pusat kota atau lokasi wisata, sering kali menjadi daya tarik bagi gelandangan dan pengemis. Lokasi ini memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan uang dari masyarakat lokal maupun wisatawan. Penelitian di Thailand oleh Somsak et al. (2019) menunjukkan bahwa pengemis cenderung berlokasi di area dengan arus lalu lintas tinggi atau tempat ibadah yang ramai, karena peluang mendapatkan uang lebih besar. Di Indonesia, temuan serupa dilaporkan oleh Lestari (2021), yang menemukan bahwa

gelandangan dan pengemis di Jakarta sering kali memanfaatkan lokasi strategis, seperti terminal dan pasar, untuk menarik perhatian pemberi sedekah.

Sudah Tidak Berdaya (Usia Lanjut)

Orang lanjut usia sering kali menjadi gelandangan dan pengemis karena tidak memiliki dukungan keluarga atau tidak mampu bekerja. Faktor usia memperparah ketidakberdayaan mereka, baik secara fisik maupun ekonomi. Laporan dari HelpAge International (2020) menyebutkan bahwa lebih dari 50% lansia tunawisma di negara berkembang tidak memiliki akses terhadap program pensiun atau jaminan sosial. Di Indonesia, penelitian oleh Sulistio (2022) menunjukkan bahwa lansia yang menjadi gelandangan biasanya kehilangan dukungan keluarga akibat konflik atau kemiskinan keluarga (Keadilan & 2021, n.d.; Kencana et al., n.d.).

Keterampilan Kerja

Keterampilan kerja yang rendah atau tidak ada sama sekali juga menjadi penyebab utama seseorang terpaksa menjadi gelandangan atau pengemis. Mereka yang tidak memiliki keterampilan sering kali kesulitan bersaing di pasar kerja formal maupun informal. Studi oleh ILO (2020) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan keterampilan adalah salah satu penyebab utama pengangguran di kalangan masyarakat miskin. Penelitian di Indonesia oleh Wardani et al. (2022) menemukan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan dasar yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Maka, faktor internal dan eksternal, baik sifat malas, kemiskinan, pendidikan, hingga keterampilan kerja, saling berinteraksi dan memperparah kondisi individu menjadi gelandangan dan pengemis. Penelitian ini mempertegas pentingnya pendekatan holistik dalam menangani permasalahan sosial ini, melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi angka gelandangan dan pengemis di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: (1) faktor internal yang menjadi penyebab warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis di unit pelaksana teknis daerah balai pungai sejahtera binjai adalah factor mental, sifat malas, cacat fisik; (2) faktor eksternal yang menjadi penyebab warga binaan usia dewasa menjadi gelandangan dan pengemis di unit pelaksana teknis daerah balai pungai sejahtera binjai adalah factor kemiskinan, ekonomi, pendidikan, labil/ikut-ikutan, keterampilan kerja, letak geografis, sudah tidak berdaya. Bagi pemerintah, agar lebih memberdayakan masyarakat dengan pendidikan dan pekerjaan serta mental agar masyarakat tidak hidup menggelandang dan mengemis melainkan menjadi masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyemang, E., Forkuor, J. B., Kondor, R., & Odongo, D. A. (2024). The street begging economy: investigating the economic strategies of street beggars in Ghana. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 44(11/12), 1137–1151. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2024-0178>
- Aizuddin, A. N., Abdul Jabar, S. W., & Idris, I. B. (2019). Factors associated with health services financier among temporary sheltered homeless in urban Malaysia. *BMC Public Health*, 19. <https://doi.org/10.1186/S12889-019-6871-5>
- Aji, A. W., Susilo, R. K. D., & Kusumastuti, F. (2023). Involution of Community Empowerment in Strengthening the Household Economy of Homeless and Beggars in Topeng Village, Malang City. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 8(2), 96–115. <https://doi.org/10.17977/UM021V8I2P96-115>
- Banks, G., Jowett, S., Brown, A., & Goodall, J. (2003). A view from the street: homelessness,

- begging and drug misuse. *Safer Communities*, 2(1), 40–42. <https://doi.org/10.1108/17578043200300007>
- Bedasari, H., Publik, E. W.-P. J. I. A., & 2020, undefined. (n.d.). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *Journal.Uir.Ac.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/5973>
- Delfirman, D., ... R. E.-... I. J. I., & 2024, undefined. (n.d.). Politik Pencitraan dalam Wacana Gelandangan dan Pengemis: Analisis Jaringan Teks Pasca Pengangkatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI. *Jurnal.Kominfo.Go.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/5538>
- Gowreesunkar, V. G., Seraphin, H., & Nazimuddin, M. (2021). Beggarism and black market tourism – a case study of the city of Chaar Minaar in Hyderabad (India). *International Journal of Tourism Cities*, 7(3), 662–682. <https://doi.org/10.1108/IJTC-12-2019-0210>
- Harahap, F. I. N., & Irwan, M. (2019). Empowerment On Climate Change: How Community Based Organizations Serving In Growing participation from society. *Journal of Millennial Community*, 1(1), 22–31.
- Husein Suti, Y. K. (2022). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. <http://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/18>
- Indriyani, I., ... S. S.-J. (Jurnal I., & 2022, undefined. (n.d.). Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. *Ejournal.Mandalanursa.Org*. Retrieved December 7, 2024, from <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3368>
- Irwan, M., Anggreni, A., Sunita, J., & Suhdi, H. (2022). Life Skills Education Through Non-Formal Education For People With Physical Disabilities. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 10(2), 235–242.
- Keadilan, W. R.-J. H. S., & 2021, undefined. (n.d.). Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis. *Ejurnalunsam.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2666>
- Kencana, U., Yuswalina, Y., Cahaya, E. T.-S., & 2021, undefined. (n.d.). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi COVID-19. *Journal.Fh.Unsri.Ac.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1039>
- Korstanje, M. E. (2024). Poverty as a Commodity, Poverty as an Attraction. In *Of Tourists and Vagabonds in the Global South* (pp. 17–33). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83608-044-220241002>
- Maryatun, M., Raharjo, S., Informa, B. T.-S., & 2022, undefined. (n.d.). Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis. *Ejournal.Poltekesos.Ac.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/2977/1547>
- Murphy, R. H. (2016). Beggaring thy neighbor at the state and local level. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(4), 532–539. <https://doi.org/10.1108/JFEP-07-2016-0045>
- Owusu, C., & Kankam, P. K. (2020). Information seeking behaviour of beggars in Accra. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 69(4/5), 205–220. <https://doi.org/10.1108/GKMC-07-2019-0080>
- Rehman, S. U., Zhang, Q., Kubalek, J., & Al-Okaily, M. (2023). Beggars can't be choosers: factors influencing intention to purchase organic food in pandemic with the moderating role of perceived barriers. *British Food Journal*, 125(9), 3249–3271. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1095>
- Salifu, A., & Abdul-Karim, A. U. (2024). The role of community leaders in the eradication of alms begging in Nima, Ghana. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(2), 362–380. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0198>

- Sari, D., Sosial, A. B.-J. M. J. I., & 2020, undefined. (n.d.). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Ojs.Unik-Kediri.Ac.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/821>
- Septiadi, Dudi Nursan, M. (2020). Pengentasan kemiskinan Indonesia: Analisis indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>
- Sopah, F., Kusumawati, W., Syntax, K. W.-, & 2020, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, 2(6), 27-40. <http://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/339>
- Taiwo, A. O. (2018). Spatio-temporal differentials in street begging: the case of Ibadan municipality, Nigeria. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(11/12), 944-955. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2017-0035>
- Waleleng, G., AGRI-SOSIOEKONOMI, M. P.-, & 2023, undefined. (n.d.). Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Retrieved December 7, 2024, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/46924>